PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**

UNIT KERJA : **WAKIL PIMPINAN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **A RIFA'I**
2. Jabatan : **WAKIL BUPATI**
3. NHK : **532100**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 1.430.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/112 m2 di KAB / KOTA EMPAT LAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 610.000.000
2. Tanah Seluas 15.000 m2 di KAB / KOTA EMPAT LAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. Tanah Seluas 2.549 m2 di KAB / KOTA EMPAT LAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 169 m2/63 m2 di KAB / KOTA KOTA LUBUKLINGGAU , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 752.500.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
2. MOTOR, HONDA CBR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI COLT DIESEL Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
4. MOBIL, HONDA HRV MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA — Rp. ----

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.000.000
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	2.188.500.000
III.	HUTANG	Rp.	428.000.000
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.760.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.